

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 tahun Prof Dr B Arief Sidharta, S.H. Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Editor) Refika Aditama (Bandung, 2008).
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Bedner, Adriaan W, Peradilan di Indonesia, (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010).
- Hidayat, Arief, Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu, (Jakarta: Dalam Acara Continuing Legal Education Mahkamah Konstitusi, 2013).
- M. Gaffar, Janedjri, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011).
- Palguna, I Dewa Gede, Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan), (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Santoso. Topo, Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2006).
- W. Bedner, Adriaan, Peradilan di Indonesia, (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010).

Jurnal

Anwar, M, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, Jurnal Yuridika Volume 31 Nomor 2, 2016.

Bisariyadi, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3, 2012.

Marwiyah, Siti, Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada Dalam Konsep Hukum Pemilu di Indonesia, Jurnal Konstitusi PKK FH, Unitomo, Volume I Nomor 1, 2010.

Hardianto, Danang, Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2, 2014.

Romli, Lili, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartain di Indonesia, Jurnal Politica, Volume 2 Nomor 2, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Internet

Gaffar, Janedjri M, “Hakim Konstitusi dan Negarawan, mkri.id, 2015.